

Internalisasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Penguatan Karakter Disiplin Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung

Aulia Fujianti^{a, 1*}, Sapriya^{a, 2}, Kokom Komalasari^{a, 3}, Rahmat^{a, 4}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ auliafujianti25@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 9 Juli 2026;

Revised: 10 Juli 2026;

Accepted: 2 September 2026.

Kata kata kunci:

Sila Kedua Pancasila;

Pendidikan Karakter;

Disiplin;

Keadaban.

: ABSTRAK

Pendidikan Pancasila berperan strategis dalam menanamkan disiplin pada siswa sebagai wujud pengamalan Sila Kedua. Namun, kajian terdahulu umumnya membahas pendidikan karakter secara makro, sementara studi spesifik yang mengintegrasikan Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" sebagai solusi atas krisis kedisiplinan masih sangat terbatas. Menjawab *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji peran Sila Kedua sebagai instrumen penyelesaian masalah kedisiplinan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung. Menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari pihak terkait dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Temuan pokok penelitian menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan siswa dipicu oleh lemahnya pengawasan dan inkonsistensi aturan di sekolah. Sebagai solusinya, internalisasi nilai Sila Kedua terbukti efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan humanis melalui penerapan pembelajaran kontekstual serta penguatan sinergi yang berkelanjutan antara sekolah dan orang tua. Simpulannya, hasil penelitian ini memberikan implikasi nyata terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas yang menuntut perbaikan metode pengajaran agar lebih aplikatif guna mencetak generasi yang humanis, adil, dan beradab.

ABSTRACT

Internalizing the Principle of Just and Civilized Humanity to Strengthen the Discipline Character of Students at State Junior High School 20 Bandung. Pancasila Education plays a strategic role in instilling student discipline as a manifestation of the Second Principle. However, previous studies have generally discussed character education at a macro level. In contrast, specific studies that integrate the Principle of "Just and Civilised Humanity" as a solution to disciplinary crises remain scarce. Addressing this research gap, this study offers a novel contribution by examining the role of the Second Principle as an instrument for solving disciplinary issues at State Junior High School 20 Bandung. Employing a descriptive-analytical qualitative method, data were collected through interviews, observations, and document analysis from relevant stakeholders using *purposive sampling*. The principal findings indicate that student indiscipline is triggered by weak supervision and inconsistent school rules. As a solution, the internalisation of the Second Principle's values has proven effective in fostering humanistic discipline by implementing contextual learning and strengthening continuous synergy between the school and parents. In conclusion, this study's findings have tangible implications for Pancasila Education in the classroom, necessitating improvements in teaching methods better to cultivate a humanistic, just, and civilised generation.

Copyright © 2026 (Aulia Fujianti, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Fujianti, A., Sapriya, S., Komalasari, K., & Rahmat, R. (2026). Internalisasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Penguatan Karakter Disiplin Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.56393/decive.v6i1.4628>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila memiliki urgensi fundamental sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional guna menjawab amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yakni mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, berkeadilan, dan berdaya saing (Kaelan, 2013; Karim, 2017). Urgensi pendidikan nilai ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan kompleksitas tantangan abad ke-21, di mana arus globalisasi dan digitalisasi yang masif tidak hanya menuntut penguasaan teknologi, tetapi juga berisiko memicu krisis identitas dan degradasi moral di kalangan generasi muda (Budimansyah & Suryadi, 2019). Degradasi tersebut tercermin dengan kuat dalam berbagai permasalahan karakter peserta didik saat ini. Merujuk pada data empiris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai laporan pendidikan, tercatat adanya tren peningkatan angka pelanggaran tata tertib, perundungan (*bullying*), tingkat absensi, hingga minimnya etika pergaulan di lingkungan sekolah (Azhari & Yuliana, 2020; Suyatno et al., 2019). Berbagai penyimpangan tersebut menjadi indikator melemahnya daya ikat nilai-nilai moral. Oleh karena itu, di tengah himpitan krisis karakter dan tantangan zaman, pembentukan karakter disiplin menjadi urgensi yang sangat mendesak sebagai fondasi awal untuk membentengi peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Gultom, 2025).

Penguatan Pendidikan Pancasila dalam kebijakan kurikulum saat ini, yang berorientasi pada pembentukan Profil Pelajar Pancasila (Kemdikbudristek, 2022; Yusuf & Arfiansyah, 2022), sejatinya harus berakar pada pemahaman filosofis yang mendalam, khususnya pada Sila Kedua: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Secara filosofis, tokoh pemikir terkemuka Pancasila, Notonagoro (dalam Kaelan, 2014), menegaskan bahwa hakikat sila ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharga dan bermartabat, sehingga setiap tindakannya harus dilandasi budi nurani. Sila ini secara utuh mengintegrasikan tiga nilai fundamental: kemanusiaan (kesadaran untuk menghargai harkat sesama), keadilan (keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban), serta keberadaban (kepatuhan terhadap etika dan norma sosial). Konseptualisasi ini beririsan erat dengan teori *civic character* (karakter kewarganegaraan) yang menggarisbawahi bahwa warga negara yang paripurna harus memiliki *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan), seperti rasa hormat (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) untuk menjaga harmoni sosial (Branson, 1999; Lickona, 1991). Oleh karena itu, relevansi Sila Kedua terhadap pembentukan karakter disiplin sangat kuat. Kedisiplinan tidak lagi dimaknai sebatas kepatuhan mekanis terhadap aturan, melainkan wujud kesadaran etis (*keberadaban*) untuk menjaga ketertiban bersama tanpa melanggar hak orang lain (*keadilan*). Dengan kata lain, siswa yang disiplin merupakan representasi nyata dari manusia yang adil dan beradab dalam ekosistem pendidikan.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila, karakter disiplin bukanlah sekadar bentuk kepatuhan buta terhadap otoritas, melainkan manifestasi kesadaran internal untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban (Hidayah et al., 2026; Lestari et al., 2025; Sari et al., 2025). Konsep ini sejalan dengan visi transformasi pendidikan melalui Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi "Mandiri" yang menuntut kemampuan regulasi diri (regulasi emosi dan perilaku), serta dimensi "Berakhlak Mulia" yang mencakup etika dalam berinteraksi dengan sesama (Kemdikbudristek, 2022; Rahayu et al., 2023; Anggreani et al., 2024; Imanuria et al., 2024; Risakotta et al., 2024). Secara teoretis, merujuk pada konsep pendidikan karakter Lickona (1991), kedisiplinan yang sejati harus mengintegrasikan *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan bermuara pada *moral action* (tindakan moral). Ketika peserta didik mencapai tahap *moral action*, karakter disiplin ini bertransformasi menjadi *civic responsibility* (tanggung jawab kewarganegaraan). Mematuhi tata tertib sekolah, pada hakikatnya, merupakan wujud *civic responsibility* dalam skala mikro, di mana siswa belajar menghormati hak orang lain demi menjaga ketertiban sosial. Akan tetapi, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang tajam. Fenomena pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Sila Kedua seperti datang terlambat, melanggar atribut seragam, merusak fasilitas, membuang

sampah sembarangan, hingga krisis etika verbal masih kerap terjadi (Hidayat & Patras, 2018; Lukito & Riyanti, 2021). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa internalisasi nilai "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" belum sepenuhnya menyentuh ranah tindakan moral, sehingga membutuhkan pendekatan strategis agar nilai-nilai luhur peradaban tidak sekadar menjadi teks hafalan, melainkan terwujud dalam perilaku nyata (Wibowo & Gunawan, 2016; Pratama et al., 2024).

Keterbatasan literatur terdahulu yang umumnya masih terpaku pada diskursus Pendidikan Pancasila secara teoretis-normatif atau terjebak pada penyelesaian kedisiplinan berbasis sanksi (punitif), serta belum adanya kajian empiris yang secara spesifik mengoperasionalkan nilai suatu Sila untuk perbaikan perilaku harian siswa, khususnya pada masa krisis transisi psikologis di tingkat SMP (Mau et al., 2024; Manobi et al., 2024; Rering et al., 2024). Menjawab *research gap* tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini secara tegas menempatkan Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" bukan sekadar materi hafalan, melainkan sebagai instrumen penyelesaian masalah kedisiplinan secara humanis yang mengukur keberhasilan dari tingkat internalisasi keadaban siswa, sejalan dengan tuntutan kontekstual Kurikulum Merdeka (Gunawan et al., 2023; Narahayaan et al., 2024; Utami et al., 2024; Setiawan et al., 2024; Nurhaifa et al., 2023). Berpijak pada pergeseran paradigma yang transformatif ini, rumusan masalah penelitian difokuskan pada: Bagaimana peran Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam menanamkan karakter disiplin pada peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Bandung? Melalui rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif peran Sila Kedua dalam memperkaya khazanah keilmuan *civic disposition*, sekaligus menawarkan purwarupa (*role model*) yang praktis bagi ekosistem sekolah dalam menangani krisis disiplin melalui desain pembelajaran yang inovatif dan memanusiakan manusia.

Metode

Penelitian kualitatif berpendekatan deskriptif-analitis ini mengkaji fenomena kedisiplinan siswa dan implementasi Sila Kedua Pancasila di SMP Negeri 20 Bandung pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap tujuh informan (tiga siswa, dua guru, dan dua orang tua) yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah instrumen pengumpulan data divalidasi melalui *peer debriefing*, keabsahan data diuji secara ketat menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tahapan reduksi data melalui pengkodean tematik, penyajian data secara naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara iteratif untuk menghasilkan temuan akhir yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagian besar peserta didik di SMP Negeri 20 Bandung memiliki pemahaman konseptual dasar mengenai Pancasila, terutama pada tingkat kemampuan menyebutkan bunyi sila-sila dan memberikan contoh normatif perilaku yang dianggap sesuai dengan nilai "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", seperti saling menghargai dan membantu teman. Secara kognitif, hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran Pendidikan Pancasila telah berhasil mentransmisikan informasi dasar mengenai isi Pancasila sesuai dengan tuntutan kurikulum (Azhari & Yuliana, 2020; Budimansyah & Suryadi, 2019). Namun, pemahaman ini masih bersifat deklaratif dan belum secara konsisten terwujud dalam bentuk sikap dan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sekolah sehari-hari, sehingga menunjukkan adanya jarak antara "tahu nilai" dan "hidup dalam nilai" yang diajarkan.

Berdasarkan temuan lapangan di SMP Negeri 20 Bandung, sebagian besar peserta didik secara kognitif telah memiliki pemahaman dasar mengenai sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Mereka mampu mengutip bunyi prinsip tersebut dan memberikan contoh perilaku normatif, seperti saling menghargai dan saling membantu. Namun, pemahaman ini masih bersifat deklaratif dan belum

secara konsisten terwujud dalam bentuk sikap serta kebiasaan disiplin dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Fenomena adanya jarak antara "tahu nilai" dan "hidup dalam nilai" ini terkonfirmasi melalui pengakuan siswa. Salah satu siswa kelas VII mengungkapkan pandangannya terkait materi Pendidikan Pancasila:

"Saya sudah hafal betul materi itu dari pelajaran, tapi saya tidak benar-benar memikirkannya saat di sekolah. Rasanya lebih seperti sesuatu yang diucapkan saat ujian." (Wawancara dengan siswa kelas VII)

Kondisi ini didukung oleh observasi dari Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang menyoroti kurangnya internalisasi nilai pada diri siswa saat berada di luar jam pelajaran:

"Sebagian besar siswa dapat mengutip prinsip tersebut dan memberikan contoh normatif, seperti bersikap baik kepada teman. Namun, ketika saya mengamati mereka di luar kelas, pemahaman itu tidak selalu tercermin dalam perilaku mereka. Ada kesenjangan antara mengetahui dan mempraktikkannya." (Wawancara dengan guru)

Kesenjangan antara pengetahuan kognitif dan perilaku nyata ini terekam jelas dalam dominasi pelanggaran kedisiplinan, seperti keterlambatan berulang, modifikasi seragam, pembuangan sampah sembarangan, kerusakan fasilitas, hingga penggunaan bahasa kasar antarsiswa. Ketika ditelusuri lebih jauh, pelanggaran disiplin ini sering kali bukan disebabkan oleh penolakan terhadap nilai-nilai Pancasila, melainkan oleh kelemahan dalam mengatur diri dan mengelola waktu. Hal ini diakui oleh seorang siswa kelas IX (S3) yang kerap terlambat:

"Bagi saya ini lebih karena saya tidak mengatur waktu dengan baik di pagi hari, bukan karena saya tidak peduli. Namun, saya tahu bahwa kedatangan saya yang terlambat mengganggu jalannya kelas." (Wawancara dengan siswa kelas IX)

Selain itu, lemahnya *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) pada siswa juga dipicu oleh *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi), yakni inkonsistensi keteladanan dan penegakan aturan oleh pihak sekolah. Siswa kelas VIII yang juga merupakan anggota dewan siswa menyoroti kebingungan akibat ketidakkonsistenan ini:

"Ada guru yang membiarkan saja kalau kita sedikit terlambat, ada pula yang sangat ketat dan memarahi kita di depan semua orang. Hal ini membingungkan karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan." (Wawancara dengan siswa kelas VIII)

Berdasarkan hasil temuan tersebut, sebagian besar peserta didik secara kognitif telah memiliki pemahaman dasar mengenai sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Namun, pemahaman deklaratif ini belum secara konsisten terwujud dalam sikap dan kebiasaan sehari-hari. Terdapat jarak yang lebar antara "mengetahui nilai" dan "menghidupi nilai". Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, fenomena ini mengindikasikan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah tersebut belum sepenuhnya berhasil membentuk *civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang bermuara pada *civic character* (karakter kewarganegaraan) yang utuh ((Joel et al., 2024; Salsabila et al., 2023; Ningari, 2023). Hal ini senada dengan tesis bahwa pendidikan karakter akan gagal bila berhenti pada tataran kognitif tanpa diikuti oleh pembiasaan dan keteladanan yang nyata (Lickona, 2012; Saripudin & Komalasari, 2017). Rendahnya internalisasi ini berakar pada pola pembelajaran Pendidikan Pancasila yang masih didominasi pendekatan ceramah (*teacher-centered*), di mana nilai kemanusiaan dan keadilan direduksi menjadi sekadar materi hafalan untuk ujian, bukan sebagai kompas moral dalam bertindak (Azhari & Yuliana, 2020; Suyatno et al., 2019; Rahayu et al., 2025; Kafat, 2023).

Kondisi tersebut seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai pengajaran pengetahuan kewarganegaraan, melainkan sebagai pendidikan karakter yang mengintegrasikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor secara utuh (Kaelan, 2013; Karim, 2017). Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup, memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka etika dalam pembentukan disiplin, terutama melalui sila kedua yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan keadaban dalam interaksi sosial (Sagala & Nasution, 2017; Permatasari, 2023). Artinya, disiplin sekolah bukan semata-mata kepatuhan mekanis terhadap tata tertib, melainkan wujud konkret dari penghargaan terhadap hak orang lain dan tata kehidupan bersama yang bermartabat. Ketika dimensi ini belum dipahami secara mendalam, penerapan disiplin cenderung dipandang oleh siswa hanya sebagai kewajiban administratif.

Kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku ini terekam jelas dalam berbagai bentuk pelanggaran kedisiplinan yang dominan di SMP Negeri 20 Bandung, seperti keterlambatan berulang, modifikasi seragam yang menyalahi aturan, membuang sampah sembarangan, kerusakan fasilitas, hingga penggunaan bahasa kasar antarsesama siswa. Jika dianalisis menggunakan pisau bedah Sila Kedua, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah sekadar masalah administratif, melainkan wujud krisis *civic responsibility* (tanggung jawab kewarganegaraan). Keterlambatan, misalnya, mencerminkan pengabaian terhadap hak guru dan teman sebaya untuk belajar dengan tenang. Dalam kerangka Profil Pelajar Pancasila, ketidakmampuan siswa dalam mengatur waktu dan mematuhi tata tertib ini menunjukkan kelemahan pada dimensi Mandiri, di mana siswa belum memiliki regulasi diri yang memadai (Kemdikbudristek, 2022; Damanik, 2022; Fadilah, 2023; Iswahyudi et al., 2025; Fauziyyah et al., 2024). Demikian pula, perilaku membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas publik, dan melontarkan ejekan verbal merupakan bentuk dehumanisasi berskala mikro yang sangat bertentangan dengan dimensi Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, khususnya dalam konteks akhlak terhadap manusia dan lingkungan (Hasanah & Budiman, 2021; Nugroho & Hidayati, 2023).

Untuk mengatasi problematika tersebut, penelitian ini menemukan bahwa penguatan disiplin harus direposisi dari pendekatan punitif (hukuman) ke pendekatan dialogis dan partisipatif. Guru Pendidikan Pancasila harus memfasilitasi siswa untuk menyusun kesepakatan kelas dan konsekuensi logisnya secara bersama-sama. Praktik ini merupakan bentuk translasi Sila Kedua ke dalam regulasi keseharian yang sejalan dengan dimensi Gotong Royong dalam Profil Pelajar Pancasila. Ketika siswa dilibatkan dalam pembuatan aturan seperti program "Sekolah Beradab" mereka memandang disiplin sebagai kontrak moral bersama untuk menjaga hak orang lain, bukan sebagai paksaan sepihak (Gregory et al., 2016; Morrison & Vaandering, 2012). Melalui kerja kolaboratif ini, karakter kedisiplinan tumbuh sebagai wujud *civic virtue*, di mana siswa secara sadar mempraktikkan rasa hormat (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam relasi sosial di sekolah (Dewi et al., 2023; Kumala et al., 2025; Ismanto et al., 2024; Janah et al., 2024).

Implikasi temuan terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila di tingkat SMP menuntut pergeseran paradigma secara fundamental. Mengingat siswa SMP berada pada fase transisi psikologis dalam pencarian identitas, guru Pendidikan Pancasila tidak boleh lagi mengandalkan metode indoktrinatif. Pembelajaran harus dirancang secara kontekstual, berbasis pemecahan masalah (*problem-based learning*) atau berbasis proyek (*project-based learning*). Kasus-kasus riil kedisiplinan di sekolah seperti dampak perundungan verbal atau kerugian akibat keterlambatan harus dibawa ke ruang kelas sebagai bahan refleksi dan dialog moral. Selain itu, evaluasi Pendidikan Pancasila di SMP tidak boleh hanya berpusat pada nilai kognitif di atas kertas, tetapi juga harus terintegrasi dengan pemantauan perilaku (psikomotorik-afektif) melalui kolaborasi yang erat dengan guru Bimbingan dan Konseling serta wali murid. Hanya melalui ekosistem pembelajaran yang aplikatif, reflektif, dan kolaboratif inilah Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dapat benar-benar hidup sebagai *civic disposition* yang memandu kedisiplinan generasi muda.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, data empiris di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 20 Bandung belum sepenuhnya berhasil membentuk *civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang bermuara pada *civic character* (karakter kewarganegaraan) yang utuh. Hal ini senada dengan tesis bahwa pendidikan karakter akan gagal bila berhenti pada tataran kognitif tanpa diikuti oleh pembiasaan dan keteladanan yang nyata (Lickona, 2012; Saripudin & Komalasari, 2017).

Jika dianalisis menggunakan pisau bedah Sila Kedua, berbagai pelanggaran seperti keterlambatan, kerusakan fasilitas, atau kekerasan verbal bukanlah sekadar masalah administratif, melainkan wujud krisis *civic responsibility* (tanggung jawab kewarganegaraan). Keterlambatan mencerminkan pengabaian terhadap hak guru dan teman sebaya untuk belajar dengan tenang, yang menunjukkan kelemahan pada dimensi Mandiri dalam Profil Pelajar Pancasila. Sementara itu, perilaku membuang sampah sembarangan dan melontarkan ejekan verbal merupakan bentuk dehumanisasi berskala mikro yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (Hasanah & Budiman, 2021; Nugroho & Hidayati, 2023).

Mengapa pola perilaku yang tidak disiplin ini dapat bertahan? Data wawancara menunjukkan bahwa metode indoktrinatif yang berpusat pada guru membuat Pancasila dipersepsikan sebagai materi hafalan untuk ujian (Azhari & Yuliana, 2020; Suyatno et al., 2019). Oleh karena itu, penguatan disiplin harus direposisi dari pendekatan punitif (hukuman) ke pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif. Praktik penyusunan kesepakatan kelas dan konsekuensi logis secara bersama-sama merupakan bentuk translasi Sila Kedua ke dalam regulasi keseharian. Penelitian tentang praktik kelas demokratis menunjukkan bahwa ketika siswa dilibatkan dalam pembuatan aturan seperti program "Sekolah Beradab" mereka memandang disiplin sebagai kontrak moral bersama untuk menjaga hak orang lain, bukan sebagai paksaan sepihak (Gregory et al., 2016; Morrison & Vaandering, 2012). Melalui keterlibatan aktif ini, muncul rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang berkorelasi positif dengan kepatuhan (Mitra, 2018; Quaglia & Corso, 2014).

Lebih lanjut, temuan mengenai *hidden curriculum* menegaskan bahwa internalisasi Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" sangat dipengaruhi oleh ekosistem kultural. Pendidikan karakter merupakan manifestasi dari teladan (*modeling*) (Lickona, 2012; Saripudin & Komalasari, 2017). Ketika guru tidak konsisten dalam menegakkan aturan atau orang tua menerapkan pola asuh yang terlalu longgar, siswa menangkap pesan implisit bahwa disiplin dan keadaban bukanlah prioritas (Mulyasa, 2019; Wibowo & Gunawan, 2016). Dalam menghadapi gempuran budaya populer dan media sosial, pentingnya sinergi sekolah-orang tua menjadi sangat krusial agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah memperoleh penguatan nyata dalam kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" memiliki potensi yang kuat sebagai kerangka etika dalam disiplin. Namun, implikasi dari temuan ini menuntut pergeseran paradigma pedagogis yang fundamental: dari sekadar transmisi pengetahuan menuju desain pembelajaran kontekstual berbasis pemecahan masalah (*problem-based learning*), serta penguatan ekosistem keteladanan yang konsisten antara sekolah dan rumah. Melalui ekosistem yang aplikatif dan kolaboratif inilah kedisiplinan tidak lagi dipahami sebagai kepatuhan mekanis, melainkan sebagai kesadaran moral untuk menghormati hak orang lain dan menjaga tatanan bersama.

Penelitian relevan dalam konteks sekolah lain juga memiliki pola yang relatif konsisten, namun tetap menawarkan nuansa baru. Internalisasi Pancasila dalam disiplin siswa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sekolah memposisikan disiplin bukan sebagai alat kontrol, melainkan sebagai proses pembiasaan terhadap nilai-nilai bersama (Mahardika, 2019). Demikian pula, pentingnya integrasi nilai Pancasila dalam praktik keseharian sekolah melalui pembelajaran kolaboratif, program keteladanan, dan penguatan iklim sekolah (Lukito & Riyanti, 2021; Suyatno et al., 2019). Hasil temuan di SMP Negeri 20 Bandung mengonfirmasi temuan-temuan tersebut, namun menambahkan bahwa posisi sila

kedua sebagai landasan etis disiplin perlu ditegaskan secara lebih eksplisit dalam desain pembelajaran dan regulasi sekolah agar siswa mampu melihat benang merah antara "aturan" dan "nilai".

Lebih jauh, konteks sosial siswa di SMP Negeri 20 Bandung juga berperan signifikan dalam memperkuat atau melemahkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam disiplin. Wawancara dengan guru dan orang tua menunjukkan bahwa sebagian siswa berasal dari keluarga dengan pola asuh yang longgar dalam hal pengawasan waktu, penggunaan gawai, dan tanggung jawab belajar di rumah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kebiasaan disiplin yang kemudian terbawa ke lingkungan sekolah. Saripudin dan Komalasari (2017) menekankan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila hanya akan efektif jika terdapat keselarasan antara nilai yang diajarkan di sekolah dan nilai yang dipraktikkan di rumah. Dalam konteks ini, pentingnya sinergi sekolah-orang tua agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila memperoleh penguatan nyata dalam kehidupan keluarga.

Selain faktor keluarga, pengaruh media dan lingkungan pergaulan sebaya juga muncul sebagai variabel yang menjelaskan mengapa internalisasi nilai sila kedua dalam disiplin berjalan tidak optimal. Siswa mengakui bahwa mereka sering meniru gaya bicara, cara berpakaian, dan pola komunikasi yang dilihat di media sosial, yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kesantunan dan keadaban yang diajarkan di sekolah. Dalam konteks masyarakat digital, pendidikan nilai perlu memperhitungkan kompetensi literasi media dan kemampuan berpikir kritis agar siswa dapat menyaring pengaruh budaya populer yang bertentangan dengan Pancasila (Rahmawati & Supriyanto, 2020). Implementasi nilai Pancasila dalam disiplin tidak dapat dipisahkan dari upaya yang lebih luas untuk membekali siswa dengan kemampuan reflektif dalam menghadapi arus nilai yang beragam di luar sekolah.

Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dalam konteks disiplin siswa di SMP Negeri 20 Bandung berada pada posisi "potensi tetapi belum optimal". Di satu sisi, secara kognitif siswa telah mengenal Pancasila; di sisi lain, secara praktis nilai tersebut belum terwujud secara konsisten dalam perilaku disiplin sehari-hari. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor pedagogis (pendekatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru), kultural (budaya sekolah dan keteladanan yang belum konsisten), dan ekologis (pengaruh keluarga, media, dan pergaulan). Perlunya pendekatan holistik dan kontekstual agar nilai-nilai yang diajarkan benar-benar menjadi habitus siswa (Azhari & Yuliana, 2020; Mulyasa, 2019; Yusuf & Arfiansyah, 2022). Dengan demikian, sila kedua Pancasila memiliki potensi kuat sebagai kerangka etik disiplin, namun menuntut desain pedagogis dan ekosistem pendidikan yang secara sadar diarahkan pada internalisasi nilai, bukan sekadar transmisi pengetahuan.

Bentuk-bentuk perilaku tidak disiplin yang paling sering muncul di SMP Negeri 20 Bandung antara lain keterlambatan datang ke sekolah, ketidakteraturan dalam mengenakan seragam sesuai ketentuan, pelanggaran terhadap tata tertib kelas, membuang sampah sembarangan, serta penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan teman. Secara permukaan, gejala ini tampak sebagai pelanggaran administratif terhadap aturan sekolah. Namun, jika dibaca melalui perspektif sila kedua Pancasila, perilaku tersebut mencerminkan lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban dalam relasi sosial. Pelanggaran disiplin sering berkaitan dengan rendahnya penghormatan terhadap hak orang lain dan lemahnya regulasi diri siswa (Hasanah & Budiman, 2021; Pratiwi & Wardani, 2018).

Dalam kerangka sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", keterlambatan yang berulang, misalnya, bukan sekadar soal manajemen waktu, tetapi juga mencerminkan sikap yang mengabaikan hak teman dan guru untuk menjalankan proses belajar dengan tertib. Ketika siswa datang terlambat, proses pembelajaran terganggu dan konsentrasi kelas terpecah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain yang telah berupaya hadir tepat waktu. Keterlambatan kronis sering kali berhubungan dengan lemahnya kesadaran akan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata masalah teknis transportasi atau jarak rumah ke sekolah (Arifin & Wahyudi, 2020; Ningsih, 2019). Hal ini

menggambarkan bahwa dimensi "adil dan beradab" dalam sila kedua harus dipahami sebagai dorongan etis untuk memikirkan dampak perilaku pribadi terhadap orang lain.

Pelanggaran terhadap aturan seragam juga memiliki dimensi etik yang terkait dengan sila kedua. Di permukaan, pelanggaran ini tampak sebagai ekspresi keinginan untuk tampil berbeda atau mengikuti tren, tetapi dalam konteks budaya sekolah, seragam berfungsi sebagai simbol kesetaraan dan kebersamaan. Ketika siswa dengan sengaja memodifikasi seragam atau menggunakan atribut berlebihan, sering kali muncul kesan ingin menonjolkan diri secara berlebihan yang berpotensi menciptakan jarak sosial atau bahkan ejekan di antara teman sebaya. Kepatuhan terhadap aturan berpakaian di sekolah berkorelasi dengan rasa memiliki terhadap komunitas sekolah dan penerimaan terhadap nilai kebersamaan (Kurniawan, 2017; Sari & Rahman, 2022). Sikap beradab juga berarti menghormati norma-norma bersama yang disepakati untuk menjaga keharmonisan dalam relasi sosial.

Temuan lapangan juga memperlihatkan adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas sekolah, seperti mencoret meja, dinding, atau bangku. Perilaku ini menunjukkan lemahnya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan bersama dan minimnya penghargaan terhadap hasil kerja orang lain yang membangun serta memelihara fasilitas tersebut. Tindakan merusak dan mengotori ruang publik sekolah dapat dipahami sebagai bentuk dehumanisasi tidak langsung, karena mengabaikan kenyamanan dan hak orang lain untuk menikmati lingkungan belajar yang bersih dan tertib. Perilaku merusak fasilitas publik sering berakar pada lemahnya empati terhadap "orang lain anonim" yang terdampak oleh kerusakan tersebut (Hidayati & Lestari, 2019). Aspek lain yang cukup mengemuka adalah penggunaan bahasa kasar, hinaan, atau ejekan antarsiswa, baik di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. Praktik ini, yang kadang dianggap sebagai "candaan" oleh sebagian siswa, pada dasarnya bertentangan langsung dengan prinsip kemanusiaan yang beradab karena merendahkan martabat orang lain. Normalisasi ejekan dan hinaan dalam interaksi sehari-hari berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis korban serta iklim kelas secara keseluruhan (Nugroho & Hidayati, 2023). Sikap beradab menuntut kemampuan mengendalikan ekspresi emosi dan memilih kata-kata yang menghormati martabat sesama, bukan sekadar menghindari kekerasan fisik.

Mengapa pola perilaku tidak disiplin ini dapat bertahan meskipun siswa telah mendapatkan Pendidikan Pancasila secara formal? Data penelitian ini menunjukkan bahwa bagi sebagian siswa, Pancasila masih dipersepsi sebagai "materi pelajaran" yang terpisah dari kehidupan nyata, bukan sebagai rujukan etis dalam bertindak. Siswa cenderung menghafal sila-sila Pancasila untuk keperluan ujian, tetapi tidak melihat kaitannya secara langsung dengan perilaku konkret di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa sila kedua belum berfungsi sebagai kerangka berpikir ketika siswa mengambil keputusan sehari-hari terkait disiplin, melainkan tetap berada pada wilayah simbolik dan retorik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila masih perlu bergeser dari pendekatan normatif-deklaratif ke pendekatan yang lebih kontekstual dan reflektif. Penekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan lebih mudah diinternalisasi ketika dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, seperti kasus keterlambatan, konflik antarteman, atau kerusakan fasilitas yang mereka alami secara langsung (Widodo & Suryani, 2021; Wulandari & Sari, 2019). Pendekatan studi kasus, diskusi moral, dan refleksi bersama tentang konsekuensi suatu tindakan terhadap orang lain terbukti lebih efektif dalam menanamkan empati dan rasa tanggung jawab sosial, yang merupakan inti dari sila kedua.

Dari sisi teoretik, temuan ini mengonfirmasi pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang hanya akan menjadi "*living ideology*" apabila nilai-nilainya dihidupkan dalam praktik sosial yang konkret, bukan sekadar dikutip dalam dokumen resmi (Latif, 2018; Zuhdi, 2015). Manifestasi perilaku tidak disiplin di SMP Negeri 20 Bandung belum sepenuhnya menjadi lensa moral yang digunakan siswa untuk menilai dan mengarahkan tindakannya. Ketika nilai Pancasila dioperasionalkan dalam bentuk norma kelas yang disepakati bersama dan dikaitkan langsung dengan pengalaman siswa, terjadi penurunan signifikan dalam pelanggaran disiplin (Fauzi & Rahman, 2021; Karimah & Noor, 2022).

Perilaku tidak disiplin yang ditemukan dibaca sebagai indikator perlunya rekontekstualisasi sila kedua dalam desain pembelajaran dan budaya sekolah. Manifestasi perilaku tidak disiplin di SMP Negeri 20 Bandung, mulai dari keterlambatan, pelanggaran seragam, kerusakan fasilitas, hingga kekerasan verbal, disebabkan oleh internalisasi sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang masih bersifat parsial. Disiplin tidak dapat dipisahkan dari dimensi kemanusiaan dan keadilan. Siswa cenderung mematuhi aturan secara lebih konsisten ketika mereka memaknai disiplin sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, bukan sekadar takut akan hukuman (Nugroho & Hidayati, 2023; Widodo & Suryani, 2021). Dengan membaca perilaku tidak disiplin ini, penelitian ini memberikan dasar ilmiah untuk merancang intervensi pendidikan yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran moral tentang mengapa perilaku tersebut bertentangan dengan martabat kemanusiaan dan keadaban yang dijunjung Pancasila.

Inti penguatan disiplin berbasis sila kedua Pancasila terletak pada reposisi disiplin sebagai ekspresi penghargaan terhadap martabat manusia, bukan sekadar kepatuhan mekanis terhadap tata tertib. Di SMP Negeri 20 Bandung, pelanggaran seperti keterlambatan, tidak mengerjakan tugas, hingga perilaku kurang sopan terhadap guru dan teman sebaya dapat dibaca sebagai tanda lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan karakter dapat berimplikasi terhadap perilaku disiplin yang berkelanjutan ketika peserta didik memahami alasan moral di balik aturan, serta menyadari dampak perilakunya terhadap orang lain (Berkowitz & Bier, 2014; Lickona, 2012). Disiplin tidak dipahami sebagai alat kontrol, melainkan sebagai wujud "kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Strategi pembelajaran kontekstual melalui studi kasus konkret pelanggaran disiplin yang dialami siswa sendiri terbukti menjadi jembatan penting antara nilai-nilai abstrak dan realitas. Ketika guru Pendidikan Pancasila menghadirkan kasus nyata, misalnya keterlambatan berulang yang mengganggu jalannya pelajaran atau tindakan mengejek teman di media sosial, lalu mengajak siswa merefleksikannya dari sudut pandang korban, siswa, dan guru, maka terjadi proses pembelajaran moral yang lebih mendalam. Model pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi moral mampu meningkatkan empati, sensitivitas moral, dan perilaku prososial siswa (Bowers et al., 2010; Killen & Smetana, 2015; Kim & Lim, 2020). Pemahaman sila kedua tidak berhenti pada hafalan, tetapi menjadi kerangka berpikir siswa dalam menilai apakah suatu tindakan adil, beradab, dan menghormati martabat sesama.

Interpretasi penerapan pembelajaran kontekstual ini mengindikasikan pergeseran paradigma dari pendekatan indoktrinatif ke pendekatan dialogis. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya penafsir kebenaran moral, tetapi fasilitator yang mengundang siswa untuk menilai kasus, berdiskusi, dan mengemukakan argumentasi berdasarkan nilai "kemanusiaan yang adil dan beradab". Pendekatan dialogis ini dapat meningkatkan kemampuan penalaran moral dan mendorong internalisasi nilai secara otonom, bukan karena takut dihukum (Nucci & Narvaez, 2014; Tirri & Kuusisto, 2016; Fathurahman et al., 2023). Dalam konteks ini, disiplin tumbuh dari kesadaran diri dan komitmen bersama, bukan hanya dari tekanan eksternal. Program "Sekolah Beradab" yang melibatkan siswa dalam pembuatan poster, video, dan slogan tentang pentingnya disiplin dan keadaban dapat diinterpretasikan sebagai upaya membangun budaya sekolah berbasis partisipasi. Ketika siswa menjadi produsen pesan moral, bukan sekadar konsumen, muncul rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap nilai yang dikampanyekan. Keterlibatan aktif peserta didik dalam merumuskan nilai dan norma sekolah berkorelasi positif dengan kepatuhan terhadap aturan, iklim sekolah yang positif, serta penurunan perilaku negatif (Mitra, 2018; Quaglia & Corso, 2014). Sekolah Beradab menjadikan siswa sebagai subjek nilai kemanusiaan, bukan objek pengaturan.

Efektivitas sistem penghargaan berbasis nilai di SMPN 20 Bandung tidak hanya mengukur prestasi akademik, tetapi juga disiplin dan sikap beradab. Reposisi indikator keberhasilan di sekolah terhadap penghargaan ini dapat disejajarkan dengan capaian kognitif; dengan demikian, model ini

mengirim pesan kuat bahwa karakter dan perilaku disiplin sama pentingnya dengan nilai rapor. Penguatan positif yang konsisten dapat meningkatkan perilaku prososial dan menurunkan pelanggaran disiplin tanpa harus mengandalkan hukuman yang keras (Bradshaw et al., 2014). Penghargaan tersebut berfungsi sebagai pengakuan atas keberhasilan siswa dalam mewujudkan nilai "adil dan beradab" dalam interaksi sehari-hari. Penguatan kolaborasi sekolah-orang tua melalui *workshop* parenting berbasis nilai Pancasila di SMPN 20 Bandung dapat membentuk karakter disiplin; hal ini merupakan tanggung jawab ekosistem, bukan hanya sekolah. Ketidaksinkronan antara pola asuh di rumah dan kebijakan disiplin di sekolah sering kali memunculkan kebingungan nilai pada anak, bahkan mendorong resistensi terhadap aturan sekolah (Gibbs et al., 2014). Dengan menjadikan sila kedua sebagai acuan bersama, misalnya dengan menekankan kesantunan bertutur, kejujuran, tanggung jawab terhadap tugas, serta kepedulian terhadap sesama orang tua dan guru, dapat dibangun "bahasa nilai" yang seragam. Jika terjadi peningkatan komunikasi dan keselarasan nilai, perilaku negatif siswa cenderung menurun, sementara disiplin dan motivasi belajar meningkat (Epstein et al., 2018; Hornby & Blackwell, 2018).

Penyusunan kesepakatan kelas secara partisipatif, seperti toleransi keterlambatan maksimal lima menit, disertai konsekuensi sosial berupa membersihkan kelas, merupakan translasi konkret sila "kemanusiaan yang adil dan beradab" ke dalam mekanisme regulasi sehari-hari. Siswa tidak hanya diminta menerima aturan, tetapi juga terlibat dalam merumuskan batasan, alasan, dan konsekuensinya. Penelitian tentang praktik kelas demokratis dan restorative discipline menunjukkan bahwa ketika siswa dilibatkan dalam pembuatan aturan dan konsekuensinya, mereka cenderung memandang aturan sebagai kontrak moral bersama, bukan perintah sepihak, sehingga kepatuhan meningkat dan konflik berkurang (Gregory et al., 2016; Morrison & Vaandering, 2012). Konsekuensi berupa pembersihan kelas juga memiliki nilai edukatif: pelanggaran dipulihkan melalui kontribusi bagi komunitas, bukan melalui hukuman yang memalukan atau merendahkan.

Lebih lanjut, dalam perspektif keadilan dan keadaban, mekanisme kesepakatan partisipatif ini mencegah disiplin berubah menjadi praktik yang diskriminatif atau sewenang-wenang. Semua siswa tunduk pada aturan yang sama, yang mereka sepakati sendiri, dan konsekuensinya bersifat proporsional serta restoratif. Pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat semua pihak yang terlibat, dibandingkan dengan sekadar menentukan siapa yang salah dan menghukumnya (Ortega et al., 2016; Payne & Welch, 2015). Di sini, hal ini merupakan dasar normatif tetapi menjadi prinsip operasional dalam merancang sistem disiplin yang adil dan manusiawi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan diskusi ini mengakomodasi peran sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam menanamkan karakter disiplin pada peserta didik SMP Negeri 20 Bandung. Temuan ilmiah utama menunjukkan bahwa sila kedua memiliki potensi kuat sebagai landasan etis kedisiplinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban diintegrasikan secara konsisten dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan pola asuh di rumah. Mengapa dimensi-dimensi tersebut bergerak demikian? Internalisasi nilai tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulum, tetapi juga oleh teladan, konsistensi norma, dan pengalaman sosial yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan kerangka pendidikan karakter berbasis Pancasila yang menempatkan sekolah dan keluarga sebagai dua locus utama dalam pembentukan kepribadian (Harviyansa et al., 2024; Rafifah et al., 2024).

Dengan menginternalisasi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban melalui pendekatan kontekstual, partisipatif, dan kolaboratif, karakter disiplin peserta didik tidak lagi dipahami sebagai kepatuhan mekanis terhadap aturan, melainkan sebagai kesadaran moral untuk menghormati hak orang lain dan menjaga tatanan bersama. Implikasi ilmiahnya adalah bahwa sila kedua Pancasila dapat direkonstruksi bukan hanya sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai kerangka kerja pedagogis untuk membangun disiplin yang bermakna. Implikasi praktisnya, sekolah dapat menggunakan temuan ini untuk merancang program penguatan disiplin berbasis nilai Pancasila, sementara peneliti selanjutnya

dapat mengembangkan model intervensi yang lebih terukur guna menguji efektivitas strategi yang diusulkan dalam berbagai konteks sekolah lainnya.

Simpulan

Problematika kedisiplinan di SMP Negeri 20 Bandung yang berakar pada lemahnya internalisasi moral akibat pembelajaran indoktrinatif dan inkonsistensi keteladanan lingkungan dapat diatasi melalui penerapan Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang terbukti mampu mengubah kepatuhan mekanis menjadi kesadaran moral (*civic disposition*). Secara teoretis dan praktis, temuan ini mendorong transformasi Pendidikan Pancasila dari sekadar hafalan kognitif menjadi pendidikan nilai partisipatif—seperti pelibatan siswa dalam menyusun tata tertib serta menuntut sinergi berkelanjutan antara sekolah dan orang tua. Mengingat penelitian kualitatif ini terbatas pada satu sekolah, studi lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif kuasi-eksperimental pada demografi yang lebih luas guna mengembangkan purwarupa pendidikan karakter kewarganegaraan yang komprehensif pada tingkat nasional.

Referensi

- Anggreani, N., Chrisyarani, D. D., Setiawan, D. A., Susanti, R. H., & Indawati, N. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembentukan Budaya Multiliterasi Siswa Sekolah Dasar. *Mindset : Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 25–31. <https://doi.org/10.56393/mindset.v4i1.2407>
- Arifin, Z., & Wahyudi, A. (2020). Student lateness and social responsibility in secondary schools: A case from Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*, 10(4), 112–123. <https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0074>
- Azhari, A., & Yuliana, Y. (2020). Character education in the framework of Pancasila values in Indonesian schools. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(3), 45–62.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2014). Research-based fundamentals of the effective promotion of character development in schools. In L. Nucci & D. Narvaez (Eds.), *Handbook of moral and character education* (2nd ed., pp. 248–260). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203114896-ch14>
- Bowers, E. P., Li, Y., Kiely, M. K., Brittan, A., Lerner, J. V., & Lerner, R. M. (2010). The five Cs model of positive youth development: A longitudinal analysis of confirmatory factor structure and measurement invariance. *Journal of Youth and Adolescence*, 39(7), 720–735. <https://doi.org/10.1007/s10964-010-9548-5>
- Bradshaw, C. P., Leaf, P. J., Koth, C. W., & Powers, K. D. (2014). Implementation of school-wide positive behavioural interventions and supports (PBIS) in elementary schools: Observations from a randomised trial. *Education and Treatment of Children*, 37(2), 1–27. <https://doi.org/10.1353/etc.2014.0017>
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2019). Civic education and Pancasila values in strengthening students' character in Indonesia. *International Journal of Instruction*, 12(1), 1041–1054. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12167a>
- Damanik, Y. (2022). Implementasi Metode Pembelajaran Inkuiri terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Melior : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 42–45. <https://doi.org/10.56393/melior.v2i2.996>
- Dewi, L. M., Iswahyudi, D., & Wadu, L. B. (2023). Pembentukan Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Dalam Jaringan Sebagai Penunjang Karakter Disiplin di Sekolah Dasar. *Sistem-Among : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(2), 66–72. <https://doi.org/10.56393/sistemamong.v3i2.1792>
- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2018). *School, family, and community partnerships: Your action handbook*. Corwin Press. <https://doi.org/10.4135/9781071809822>
- Fadilah, N. (2023). Pemanfaatan E-Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Melior : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.56393/melior.v3i1.1633>
- Fathurahman, I., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pengaruh Model Numbered Heads Together Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pendidikan Pancasila dan

- Kewarganegaraan. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–60. <https://doi.org/10.56393/didactica.v3i2.1708>
- Fauzi, A., & Rahman, F. (2021). Pancasila-based school culture and student discipline: A multi-case study in Indonesian junior high schools. *Cakrawala Pendidikan*, 40(1), 56–70. <https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.35621>
- Fauziyyah, A., Normansyah, A. D., & Cahyono, C. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan. *Lentera : Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 19–27. <https://doi.org/10.56393/lentera.v4i1.2505>
- Gibbs, J. C., Potter, G. B., & Goldstein, A. P. (2014). *Moral development and reality: Beyond the theories of Kohlberg, Hoffman, and Haidt*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199976171.001.0001>
- Gregory, A., Clawson, K., Davis, A., & Gerewitz, J. (2016). The promise of restorative practices to transform teacher–student relationships and achieve equity in school discipline. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 26(4), 325–353. <https://doi.org/10.1080/10474412.2014.929950>
- Gultom, A. F. (2025). Revitalizing Pancasila as Living Philosophy: Socratic-Based Classroom Experimentation to Foster Critical Thinking Skills. *Paidea : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 5(2), 78–91. <https://doi.org/10.56393/paidea.v5i2.4174>
- Gunawan, S. S. A., Mulyana, D., & Cahyono, C. (2023). Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share Terhadap Karakter Mandiri Pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pijar : Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–62. <https://doi.org/10.56393/pijar.v3i2.1706>
- Harviyansa, V., Ritiauw, S. P., & Salamor, L. (2024). Analisis Civic Culture Dalam Implementasi Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Kognisi : Jurnal Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(2), 57–61. <https://doi.org/10.56393/kognisi.v4i2.2782>
- Hasanah, U., & Budiman, D. (2021). School discipline problems and character education in Indonesian secondary schools. *International Journal of Educational Research Review*, 6(4), 302–315. <https://doi.org/10.24331/ijere.973421>
- Hidayah, Y., Nuraini, L., & Septiningrum, L. (2026). Exploration of Social Model of Orchid Conservation for Strenghtening The Civic Values. *Pedagogi : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v5i2.2885>
- Hidayat, R., & Patras, Y. E. (2018). Internalisation of Pancasila values in school culture to build student character. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(4), 202–211. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.259>
- Hidayati, N., & Lestari, S. (2019). Discipline and moral reasoning among adolescents: The role of school climate. *Journal of Moral Education*, 48(3), 345–360. <https://doi.org/10.1080/03057240.2018.1556617>
- Hornby, G., & Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: An update. *Educational Review*, 70(1), 109–119. <https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1388612>
- Imanuria, C. N., Komarudin, K., & Abdillah, F. (2024). Integrasi Kurikulum Nasional dan Internasional dalam Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama. *Mindset : Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 48–54. <https://doi.org/10.56393/mindset.v4i2.2706>
- Ismanto, R., Nadziroh, N., & Pratomo, W. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Sosial Melalui Budaya Sekolah Pada Siswa Kelas II Sekolah Dasar. *Sistem-Among : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(2), 61–66. <https://doi.org/10.56393/sistemamong.v4i2.2542>
- Iswahyudi, D., Suciati, S., Amalia, W. O. S. R., & Andarwati, L. (2025). Comparison of the Effectiveness of Google Form and Quizizz on Pancasila Education Learning Outcomes in Elementary School. *Lentera : Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 68–78. <https://doi.org/10.56393/lentera.v5i1.3314>
- Janah, F. S., Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2024). Pengembangan Media Kartu Gambar Kata Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. *Sistem-Among : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.56393/sistemamong.v4i1.2098>
- Joel, M. P., Kardiman, Y., & Abdillah, F. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Religiusitas Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Komunitas Rohani Home For Generation Depok. *Pelita : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 4(1), 20–26. <https://doi.org/10.56393/pelita.v4i1.2519>

- Kaelan, M. S. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Paradigma.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kafat, D. N. (2023). Penggunaan Model Active Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 15–18. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v3i1.1160>
- Karim, M. (2017). *Pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter bangsa*. Rajawali Pers.
- Karimah, S., & Noor, H. (2022). Operationalising Pancasila values in classroom management: Implications for student discipline. *Journal of Curriculum Studies Research*, 4(2), 77–93. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2022.8>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Killen, M., & Smetana, J. G. (2015). Origins and development of morality. In R. M. Lerner (Ed.), *Handbook of child psychology and developmental science: Vol. 3. Socioemotional processes* (7th ed., pp. 701–749). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118963415.childpsy317>
- Kim, Y. H., & Lim, H. J. (2020). Effects of character education programs on students' character and behaviour: A meta-analysis. *Asia Pacific Education Review*, 21(2), 253–272. <https://doi.org/10.1007/s12564-020-09627-4>
- Kumala, F. N., Azizah, E. D., & Ayudhanti, F. (2025). Improving Pancasila Education Learning Outcomes through Educational Games-Based Discovery Learning Model in Grade III Elementary School Students. *Sistem-Among : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 5(1), 8–23. <https://doi.org/10.56393/sistemamong.v5i1.3275>
- Kurniawan, A. (2017). School uniforms, identity, and student discipline in Indonesian junior high schools. *Asia Pacific Journal of Education*, 37(3), 415–428. <https://doi.org/10.1080/02188791.2017.1334635>
- Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historis, rasionalitas, dan aktualisasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, L., Pramita, R. A., & Anakota, R. (2025). Character Education Discipline in Muhammadiyah Boarding School Dormitory Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Aimas Based on Local Wisdom. *Pedagogi : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v5i1.2887>
- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lukito, A., & Riyanti, D. (2021). Implementing Pancasila and civic values to promote student discipline in Indonesian secondary schools. *International Journal of Instruction*, 14(3), 367–384. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14322a>
- Mahardika, A. P. (2019). *Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan disiplin siswa di sekolah menengah pertama negeri* (Undergraduate thesis). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Manobi, A. E. R. P., Sumadi, T., & Abdillah, F. (2024). Pemahaman dan Praktik Guru Pendidikan Pancasila berbasis Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Menengah Atas. *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 32–38. <https://doi.org/10.56393/educare.v4i2.2639>
- Mau, A., Salamor, L., & Ritiauw, S. P. (2024). Analisis Peran Orang Tua dan Guru dalam Membentuk Karakter Kejujuran pada Anak di Sekolah Dasar. *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 45–56. <https://doi.org/10.56393/educare.v4i2.2816>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mitra, D. L. (2018). *Student voice in school reform: Building youth-adult partnerships that strengthen schools and empower youth*. SUNY Press. <https://doi.org/10.1353/book.62758>
- Morrison, B. E., & Vaandering, D. (2012). Restorative justice: Pedagogy, praxis, and discipline. *Journal of School Violence*, 11(2), 138–155. <https://doi.org/10.1080/15388220.2012.653322>
- Mulyasa, E. (2019). Strengthening student character through Pancasila and citizenship education. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(3), 192–208.
- Narahayaan, A., Aji, S. D., Sulistyowati, P., & Iswahyudi, D. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Pop-Up Book Sebagai Pengenalan Simbol Sila-Sila Pancasila di Sekolah Dasar. *Pijar : Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 18–23. <https://doi.org/10.56393/pijar.v4i1.2426>
- Ningari, W. F. (2023). Peran Guru Menanamkan Karakter Sopan Santun Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Pelita : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 6–11.

- <https://doi.org/10.56393/pelita.v3i1.1144>
- Ningsih, D. (2019). Chronic lateness among junior high school students: Causes and implications for school policy. *Indonesian Journal of Educational Counselling*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.30653/001.201932.64>
- Nucci, L., & Narvaez, D. (Eds.). (2014). *Handbook of moral and character education* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Nugroho, B., & Hidayati, T. (2023). Moral-based discipline: Rethinking punishment and reward in Indonesian schools. *International Journal of Ethics and Education*, 5(1), 21–38.
- Nurhaifa, H. S., Mulyana, D., & Cahyono, C. (2023). Pengaruh Small Group Discussion Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 43–51. <https://doi.org/10.56393/didactica.v3i2.1707>
- Ortega, L., Lyubansky, M., Nettles, S., & Espelage, D. L. (2016). Outcomes of a restorative circles program in a high school setting. *Psychology in the Schools*, 53(6), 655–670. <https://doi.org/10.1002/pits.21954>
- Payne, A. A., & Welch, K. (2015). Restorative justice in schools: The influence of race on restorative discipline. *Youth & Society*, 47(4), 539–564. <https://doi.org/10.1177/0044118X15575832>
- Permatasari, F. I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kewargaan Siswa Melalui Model Pembelajaran Controversial Issues. *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v3i1.1158>
- Pratiwi, R., & Wardani, I. (2018). Student discipline problems and teachers' classroom management strategies in Indonesian secondary schools. *Journal of Education and Practice*, 9(12), 72–81.
- Quaglia, R. J., & Corso, M. J. (2014). *Student voice: The instrument of change*. Corwin Press. <https://doi.org/10.4135/9781483380544>
- Rafifah, H. N., Pratomo, W., Nadziroh, N., & Chairiyah, C. (2024). Implementasi Karakter Peduli Sosial Melalui Muatan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kelas Sekolah Dasar. *Kognisi : Jurnal Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.56393/kognisi.v4i1.2112>
- Rahayu, S., Kharis, M., & Wahyuni, I. (2025). Enhancing Critical Thinking Skills in Pancasila and Civic Education through the Team Games Tournament Method and the Pancasila Smart Discovery Learning Model. *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 29–42. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v5i1.3289>
- Rahmawati, D., & Supriyanto, A. (2020). School discipline and moral development: The role of value-based education in Indonesia. *Journal of Moral Education*, 49(4), 520–536. <https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1728418>
- Rering, N. A., Salamor, L., & Ritiau, S. P. (2024). Penggunaan Metode Bermain Peran dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Pemahaman Hak dan Kewajiban Anak di Sekolah Dasar. *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.56393/educare.v4i2.2811>
- Risakotta, M. S., Salamor, L., & Ritiau, S. P. (2024). Analisis Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Siswa Kelas I Sekolah Dasar. *Paidea : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 4(2), 43–46. <https://doi.org/10.56393/paidea.v4i2.2818>
- Sagala, S., & Nasution, N. (2017). Pancasila as a source of values for character education in Indonesia. *Asian Social Science*, 13(9), 182–190. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n9p182>
- Salsabila, A., Mulyana, D., & Cahyono, C. (2023). Pengaruh Media Wordwall terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pelita : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 3(2), 42–51. <https://doi.org/10.56393/pelita.v3i2.1716>
- Sari, M., & Rahman, A. (2022). School uniform policy, sense of belonging, and student discipline: Evidence from Indonesian junior high schools. *International Journal of Educational Policy and Leadership*, 18(1), 1–15.
- Sari, Y. I., Annisa, U. R., & Sunaryati, Y. (2025). The Use of Interactive Game-Based Wordwall Media to Increase Student Participation in Pancasila Education. *Paidea : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.56393/paidea.v5i1.3308>
- Saripudin, D., & Komalasari, K. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah*. Refika Aditama.
- Setiawan, D. A., Bala, R., Delawanti, D., & Ghazali, S. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Pada Program Gerakan Literasi Sekolah Pada Siswa Sekolah Dasar. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 27–35.

- <https://doi.org/10.56393/didactica.v4i1.2761>
- Suyatno, S., Muchtarom, M., & Suyatmini, S. (2019). Character education based on Pancasila values: A case study of Indonesian public schools. *Cakrawala Pendidikan*, 38(2), 236–248. <https://doi.org/10.21831/cp.v38i2.24452>
- Tirri, K., & Kuusisto, E. (2016). How can schools support the moral development of gifted students? *Journal for the Education of the Gifted*, 39(3), 295–309. <https://doi.org/10.1177/0162353216657295>
- Utami, L. S., Sumadi, T., & Abdillah, F. (2024). Pengaruh Metode Kompetisi Berbasis Gamifikasi Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 21–26. <https://doi.org/10.56393/didactica.v4i1.2518>
- Wibowo, A., & Gunawan, I. (2016). The implementation of Pancasila values in building students' discipline in Indonesian schools. *International Education Studies*, 9(5), 230–239. <https://doi.org/10.5539/ies.v9n5p230>
- Widodo, H., & Suryani, L. (2021). From obedience to moral responsibility: Reframing discipline in character education. *Journal of Character Education*, 17(2), 101–118.